

**PENGARUH PELAKSANAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH DAN SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP
PENGAMANAN ASET NEGARA**
(Studi Empiris Pada Kementerian Perindustrian Wilayah Jawa Sumatera)



Oleh :

RITA TRIWI HAMIDAH

57717 / 2010

**ROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2014**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

**PENGARUH PELAKSANAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
BARANG MILIK NEGARA DAN SUMBER DAYA MANUSIA
TERHADAP PENGAMANAN ASET NEGARA**
(Studi Pada Kementerian Perindustrian Wilayah Jawa Sumatera)

Oleh :
RITA TRIWI HAMIDAH
57717/2010

Artikel ini disusun berdasarkan skripsi/ tesis untuk persyaratan wisuda periode April 2014
dan telah diperiksa/ disetujui oleh kedua pembimbing

Padang . . . Oktober 2013

Pembimbing I



Dr. H. Efrizal Syofyan, SE, M.Si, Ak
NIP. 19580519 199001 1 001

Pembimbing II



Erly Mulyani, SE, M.Si, Ak
NIP. 19730723 200604 2 001

PENGARUH PELAKSANAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DAN SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP PENGAMANAN ASET NEGARA

(Studi Pada Kementerian Perindustrian Wilayah Jawa Sumatera)

Rita Triwi Hamidah

Dr.H.Efrizal Syofyan SE,MSi,AK

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus Air Tawar Padang

Email :ritatriwi@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji 1) pengaruh pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah pengelolaan barang miliknegera terhadap pengamanan aset negara, dan 2) pengaruh sumber daya manusia terhadap pengamanan aset negara pada Kementerian Perindustrian Wilayah Jawa Sumatera. Jenis penelitian ini digolongkan sebagai penelitian yang bersifat kausatif. Populasi dalam penelitian ini menggunakan instansi yaitu satuan kerja Di lingkungan Kementerian Perindustrian Wilayah Jawa Sumatera. Jumlah Satuan Kerja adalah 35 Satuan Kerja yang terdiri dari Sekolah, Balai Pelatihan, Balai Riset, dan Balai Besar. Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel secara *total sampling*, dimana seluruh satuan kerja yang terdapat di wilayah Jawa Sumatera dijadikan sampel.. Jumlah responden sebanyak 70 orang responden dimana masing-masing satuan kerja memiliki 2 (dua) orang staf penanggungjawab. Data dikumpulkan dengan menyebarkan langsung kuesioner kepada responden yang bersangkutan. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi berganda dengan bantuan *Statistical Package For Social Science (SPSS)*. Kesimpulan penelitian menunjukkan: 1) pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah pengelolaan barang miliknegera berpengaruh signifikan positif terhadap pengamanan aset negara dengan $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $2,012 > 2,00247$ (sig $0,049 < \alpha 0,05$) yang berarti H_1 diterima, dan 2) sumber daya manusia berpengaruh signifikan positif terhadap pengamanan aset Negara dengan $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $2,216 > 2,00147$ (sig $0,005 > \alpha 0,05$) yang berarti H_2 diterima. Saran dalam penelitian ini adalah: 1) kepada para pegawai satuan kerja Kermenterian Perindustrian untuk meningkatkan kemampuan dalam penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, serta mempelajari *job description* yang telah ditetapkan instansi masing-masing, sehingga mampu menjalankan tugas sesuai dengan apa yang diembankan. 2) disarankan untuk melakukan seluruh indikator pengendalian internal pemerintah, sehingga dapat menunjang secara positif terhadap pelaksanaan pengamanan aset negara.

Kata Kunci :Pelaksanaan Sistem PengendalianIntern Pemerintah, Sumber Daya Manusia, Pengamanan Aset Negara.

Abstract

This study aims to examine 1) the effect of the implementation of the internal control system of government management of state property to the security of state assets, and 2) the influence of human resources to the security of state assets in the Ministry of Industry Java-Sumatra region. This study is classified as a type of research that is causative. The population in this study using the agencies working unit in the Ministry of Industry Java-Sumatra region. Number of Unit 35 Unit is comprised of the school, training center, research institute, and major research center. This study uses a sampling technique in total sampling, where all units are working in Java-Sumatra regions sampled. Number of respondents 70 respondents where each unit has 2 (two) staff person in charge. Data were collected by distributing questionnaires to the respondents directly concerned. The data analysis technique used is multiple regression with the help of Statistical Package For Social Science (SPSS). Conclusion the study shows: 1) the implementation of the government's system of internal control management of state property a positive significant effect on the assets securing the country with $t_{count} > t_{table}$ is $2,012 > 2,00247$ (sig $0,049 < \alpha 0,05$) which means that H_1 is accepted, and 2) human resources positively significant effect on the security state of assets with $t_{count} > t_{table}$ is $2,216 > 2,00147$ (sig $0,005 > \alpha 0,05$) which means that H_2 is accepted. Suggestions in this study were: 1) to employees working unit

Ministry of Industry to improve the implementation of Government Internal Control System, as well as studying the job description specified respective agencies, so as to carry out duties in accordance with what is entrusted.
2) *recommended to the government all indicators of internal control, so as to positively support the implementation of state asset security.*

PENDAHULUAN

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2001 tentang Pengamanan dan Pengalihan Barang Milik/ Kekayaan Negara bahwa Pengamanan Barang Milik Negara adalah kegiatan yang dilakukan pejabat berwenang untuk mengawasi/ menatausahakan Barang Milik Negara agar keberadaannya secara administrasi maupun fisik dalam keadaan utuh, tidak rusak dan tidak hilang. Pengamanan tersebut meliputi pengamanan fisik, pengamanan administrasi, dan pengamanan hukum. Dalam rangka pengamanan administratif dibutuhkan sistem penatausahaan yang dapat menciptakan pengendalian (*controlling*) atas Barang Milik Negara. Selain berfungsi sebagai alat control, sistem penatausahaan tersebut juga harus dapat memenuhi kebutuhan manajemen pemerintah di dalam perencanaan pengadaan, pengembangan, pemeliharaan, maupun penghapusan (*disposal*).

Maraknya kasus korupsi terkait aset tetap negara menunjukkan sistem pengendalian internnya masih lemah. Untuk itu setiap instansi pemerintah harus membangun sistem pengendalian intern yang andal hingga mampu mencegah terjadinya penyimpangan atau hambatan dalam pencapaian tujuan entitas. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 Sistem pengendalian intern merupakan proses integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Seluruh komponen Sistem Pengendalian Intern yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi serta monitoring atas pengelolaan aset negara harus dibangun secara memadai. Dari teori di atas menunjukkan bahwa pengamanan aset negara salah satunya dipengaruhi oleh sistem pengendalian intern yang efektif.

Pengendalian intern atau kontrol intern dirancang untuk membantu organisasi mencapainya suatu tujuan atau objektif tertentu.

Pengendalian intern merupakan suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya suatu organisasi. Pengendalian intern berperan penting untuk mencegah dan mendeteksi penggelapan (*fraud*) dan melindungi sumber daya organisasi baik yang berwujud maupun tidak berwujud (Hermiyeti, 2010:3). Dengan menetapkan serta menerapkan pengendalian intern secara baik dan benar pada suatu perusahaan, maka perusahaan tersebut akan lebih mudah dalam mencapai tujuan dan dapat meminimalkan risiko.

Tujuan sistem pengendalian intern pemerintah yang efektif yakni untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (PP No. 60 tahun 2008). Dengan demikian bahwasanya untuk tercapainya tujuan pengendalian intern yang efektif dalam pemerintah diperlukan suatu langkah yang efektif diantaranya harus memiliki kapasitas individu yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya. Di samping itu, setiap bidang pekerjaan harus dijalani oleh orang yang berbeda dalam artian untuk menjalankan pengendalian intern yang efektif dalam sebuah perusahaan tidak diperbolehkan adanya rangkap jabatan hal tersebut untuk menghindari adanya kecurangan yang mungkin terjadi dalam suatu instansi.

Sebagai pondasi bagi seluruh proses pengamanan dalam pengelolaan aset negara, setiap instansi pemerintah harus menciptakan dan memelihara lingkungan dalam organisasi yang mendorong perilaku (*behavior*) positif dan manajemen yang sehat. Utamanya adalah mendorong tersedianya seluruh pengelola aset negara yang memiliki kesadaran (*awareness*) yang kuat tentang pentingnya penegakan sistem pengendalian intern. Penciptaan ini dilakukan melalui penegakan integritas dan nilai-nilai etika oleh seluruh pegawai, komitmen terhadap kompetensi setiap komponen organisasi, adanya kepemimpinan yang kondusif, tersusunnya struktur organisasi yang mendukung strategi pencapaian

tujuan, adanya pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat, kebijakan yang sehat dalam pembinaan sumber daya manusia yang efektif dan hubungan kerja yang baik antar instansi.

Sumber daya manusia adalah pilar penyangga utama sekaligus penggerak roda organisasi dalam usaha mewujudkan visi dan misi tujuannya (Susilo, 2002:3). Suatu sistem yang sebaik apapun akan sia-sia begitu saja, apabila tidak ditunjang oleh kualitas sumber daya manusia yang memadai khususnya kualitas pribadi sumber daya manusia yang terdiri dari potensi pendidikan, pengalaman, dan pelatihan dari sumber daya manusia yang bersangkutan. Ketiga faktor kualitas sumber daya manusia tersebut diatas saling mempunyai hubungan yang erat, karena pada hakikatnya kualitas sumber daya manusia sebagai ciri-ciri pribadi akan selalu melekat pada setiap perilaku seseorang, banyak ditentukan oleh jalinan pengaruh ketiga variabel tersebut diatas.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2006 pasal 33 ayat 1 menyatakan bahwa pengelola barang, pengguna barang dan/ atau Kuasa Pengguna Barang wajib melakukan pengamanan barang milik negara/ daerah yang berada dalam penguasaannya. Dari peraturan tersebut di atas jelas bahwa peran Sumber Daya Manusia sangat berpengaruh dalam pengananan aset negara. Oleh karena itu perlu adanya sumber daya aparatur yang memiliki pemahaman akan seluruh pengelolaan aset. Dalam mengelola sumber daya manusia tersebut dapat dilakukan dengan mengikut sertakan dalam pendidikan dan pelatihan bimbingan teknis pengelolaan barang. Pembinaan ditujukan untuk meningkatkan kualitas aparat pengelola barang milik negara, sehingga melalui pembinaan yang intensif dan terarah, implementasi pengamanan aset negara dapat berjalan dengan baik dan mencapai sasaran.

Adapun fenomena yang terkait dengan pengamanan aset di wilayah Jawa dan Sumatera adalah masih adanya beberapa temuan atas pemeriksaan BPK dalam hal pengelolaan barang dan jasa dimana lemahnya Sistem Pengendalian Intern serta peran aparatur negara berpengaruh dalam temuan tersebut, ini terlihat dari hasil temuan BPK tahun 2011 dan semester I tahun 2012 di wilayah Jawa Sumatera *Sumber: BPK RI*

hasil temuan pemeriksaan pengadaan barang dan jasa

Dari data menunjukkan bahwa sangat lemahnya sistem pengendalian intern yang berakibat pada semakin tinggi risiko yang dihadapi dalam pengamanan aset. Dengan sistem tersebut, risiko terjadinya kesalahan dalam penetapan penyedia barang dan adanya kemahalan harga yang seharusnya dapat ditekan. Hal ini tidak hanya untuk proses pengadaan, tetapi perlu dikembangkan pada proses perencanaan dan penganggaran, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian aset negara.

Demikian juga pada implementasi sistem, walaupun sistem yang dibuat sudah baik, namun jika tidak dijalankan oleh sumber daya manusia yang kompeten, memiliki integritas dan nilai etika, adanya kepemimpinan yang kondusif, serta hubungan kerja yang baik antar instansi, maka sistem itu tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Dari contoh fenomena di atas dapat diketahui bahwa kurangnya kesadaran aparat dalam menjalankan tugasnya serta tidak menjalankan peraturan yang berlaku. Jika pengelolaan aset dan proses pengadaan barang dan jasa tidak dijalankan secara sehat, maka akan terjadi penyimpangan serta tidak dapat membantu pengguna dalam mencapai tujuan yang diharapkan.

Pemanfaatan barang-barang milik negara belum dilakukan secara optimal karena kurangnya ketrampilan kerja pegawai terutama yang berkaitan dengan penggunaan teknologi baru dengan komputerisasi. Perilaku aparatur pengelola barang-barang milik negara masih belum memiliki norma dan etika sebagai pengelola barang milik negara sebagai akibat dari pengusaha swasta sebagai mitra kerja yang selalu menghendaki jalan pintas dalam memperoleh tender pengadaan barang dan penunjukan langsung pengadaan barang. Budaya kerja pengelola barang-barang milik negara belum mampu meningkatkan efektivitas pengelolaan barang-barang milik negara karena penunjukan tender masih bersifat nepotisme sehingga mengakibatkan ekonomi biaya tinggi dalam pengadaan barang-barang negara. Hendaknya dalam perencanaan barang negara melalui tender

maupun penunjang langsung dengan pihak ketiga dilakukan secara transparan sehingga bisa mengurangi penyimpangan dalam pengadaan barang.

Kementerian Perindustrian memiliki beberapa satuan kerja yang bernaung di bawahnya dimana setiap tahunnya mendapatkan dana dari APBN untuk melakukan penatausahaan barang milik negara. Oleh karena itu seluruh satuan kerja memiliki wewenang sebagai pengguna barang dan memiliki kewajiban untuk menyusun laporan pertanggungjawaban penatausahaan barang milik negara yang kemudian disusun menjadi laporan Keuangan.

Adapun penelitian mengenai Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Kemampuan Sumber Daya Manusia diantaranya penelitian yang dilakukan Mifitri (2009) melakukan penelitian yang menguji tentang Studi Pengaruh Pengelolaan Barang Milik Daerah Terhadap Pengamanan Aset Daerah. Penelitian ini dilakukan pada Kantor Pemerintah daerah Kabupaten Langkat. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pengaruh pengendalian dan kemampuan aparatur memberikan dampak yang signifikan terhadap Pengamanan Aset Daerah pada Kabupaten Langkat.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk melihat sejauhmana pengamanan aset negara pada Kementerian Perindustrian wilayah Jawa Sumatera serta faktor yang mempengaruhi pengamanan aset negara. Faktor-faktor ini terdiri dari pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah pengelolaan barang milik negara dan sumber daya manusia.

TELAAH LITERATUR DAN PERUMUSAN MASALAH

Pengamanan Aset Negara

Menurut Peraturan Pemerintah No 2 tahun 2001 tentang Pengamanan dan Pengalihan Barang Milik/ Kekayaan Negara bahwa Pengamanan Barang Milik Negara adalah kegiatan yang dilakukan pejabat berwenang untuk mengawasi/ menatausahakan Barang Milik Negara agar keberadaannya secara administrasi maupun fisik dalam keadaan utuh, tidak rusak dan tidak hilang.

Pengamanan terhadap barang milik negara berupa barang inventaris dalam proses pemakaian dan barang persediaan dalam gudang yang diupayakan secara fisik, administratif dan tindakan hukum.

1. Pelaksanaan Pengamanan

Pengamanan dilakukan terhadap barang milik negara berupa barang inventaris dalam proses pemakaian dan barang persediaan dalam gudang yang diupayakan secara fisik, administratif dan tindakan hukum (PMK No 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan BMN).

a) Pengamanan fisik

Pengamanan terhadap barang-barang bergerak dilakukan dengan cara:

- 1) pemanfaatan sesuai tujuan.
- 2) penggudangan/penyimpanan baik tertutup maupun terbuka.
- 3) pemasangan tanda kepemilikan.

Pengamanan terhadap barang tidak bergerak dilakukan dengan cara:

- 1) pemagaran.
- 2) pemasangan papan tanda kepemilikan.
- 3) penjagaan.

Pengamanan terhadap barang persediaan dilakukan oleh penyimpan dan/atau pengurus barang dengan cara penempatan pada tempat penyimpanan yang baik sesuai dengan sifat barang tersebut agar barang milik daerah terhindar dari kerusakan fisik.

b) Pengamanan administratif.

Pengamanan administrasi terhadap barang bergerak dilakukan dengan cara:

- 1) pencatatan/ inventarisasi.
- 2) kelengkapan bukti kepemilikan antara lain BPKB, faktur pembelian, dll.
- 3) pemasangan label kode lokasi dan kode barang berupa stiker.

Pengamanan administrasi terhadap barang tidak bergerak dilakukan dengan cara:

- 1) pencatatan/inventarisasi.
- 2) penyelesaian bukti kepemilikan seperti: IMB, Berita Acara serah terima, Surat

Perjanjian, Akte Jual Beli dan dokumen pendukung lainnya

c) Tindakan Hukum.

Pengamanan melalui upaya hukum terhadap barang inventaris yang bermasalah dengan pihak lain, dilakukan dengan cara:

- 1) negoisasi (musyawarah) untuk mencari penyelesaian.
- 2) penerapan hukum.

Setiap instansi pemerintah harus membangun sistem pengendalian intern yang andal hingga mampu mencegah terjadinya penyimpangan atau hambatan dalam pencapaian tujuan entitas. Seluruh komponen Sistem Pengendalian Intern yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi serta monitoring atas pengelolaan aset negara harus dibangun secara memadai.

Sebagai pondasi bagi seluruh proses pengelolaan aset negara yang baik, setiap instansi pemerintah harus menciptakan dan memelihara lingkungan dalam organisasi yang mendorong perilaku (*behavior*) positif dan manajemen yang sehat. Utamanya adalah mendorong tersedianya seluruh pengelola aset negara yang memiliki kesadaran (*awareness*) yang kuat tentang pentingnya penegakan sistem pengendalian intern. Penciptaan ini dilakukan melalui penegakan integritas dan nilai-nilai etika oleh seluruh pegawai, komitmen terhadap kompetensi setiap komponen organisasi, adanya kepemimpinan yang kondusif, tersusunnya struktur organisasi yang mendukung strategi pencapaian tujuan, adanya pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat, kebijakan yang sehat dalam pembinaan sumber daya manusia yang efektif dan hubungan kerja yang baik antar instansi.

Satu hal yang perlu diperhatikan adalah Sistem Pengendalian Intern harus dibangun pada suatu titik yang optimal. Sistem Pengendalian Intern yang terlalu longgar akan meningkatkan probabilitas timbulnya risiko

penyimpangan atau kegagalan. Sebaliknya, Sistem Pengendalian Intern yang terlalu ketat akan membuat proses bisnis menjadi lambat dan mahal. Membangun Sistem Pengendalian Intern tetap harus memperhatikan *cost and benefitnya*. Oleh karena itu risiko-risiko yang ada harus dinilai dan diranking. Proses ini pada umumnya menggunakan dua parameter, yaitu semakin besar kemungkinan timbulnya dan semakin besar dampaknya. Semakin tinggi nilai parameter tersebut maka risiko tersebut semakin tinggi dan harus diprioritaskan untuk dicegah.

Pemerintah telah menerbitkan beberapa kebijakan untuk memastikan berkurangnya risiko yang telah diidentifikasi. Materi peraturan-peraturan tersebut mencakup proses reuiu kinerja atas pengelolaan aset negara, pembinaan sumber daya manusia, pengendalian fisik atas aset, penetapan dan reuiu atas indikator dan ukuran kinerja, pemisahan fungsi, otorisasi atas transaksi dan kejadian penting, pencatatan yang akurat dan tepat waktu, pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya, akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya serta dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian Intern serta transaksi dan kejadian penting.

Demikian juga pada implementasi sistem, walaupun sistem yang dibuat sudah baik, namun jika tidak dijalankan oleh Sumber Daya Manusia yang kompeten, memiliki integritas dan nilai etika, adanya kepemimpinan yang kondusif, serta hubungan kerja yang baik antar instansi, maka sistem itu tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Jika tidak dijalankan secara sehat, maka tidak dapat membantu pengguna dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Dalam proses pengadaan barang dan jasa, jika tidak dilakukan secara sehat, maka akan terjadi penyimpangan sehingga berdampak pada pengamanan aset negara. Demikian juga dalam proses pengelolaan aset negara lainnya.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2006 Pasal 32 ayat 1 menyatakan bahwa pengelola barang, pengguna barang dan/ atau Kuasa Pengguna Barang wajib melakukan pengamanan barang milik negara/ daerah yang berada dalam penguasaannya. Oleh karena itu perlu adanya sumber daya aparatur yang memiliki pemahaman akan seluruh pengelolaan aset. Dalam mengelola sumber daya manusia tersebut dapat dilakukan dengan mengikut sertakan dalam pendidikan dan pelatihan bimbingan teknis pengelolaan barang. Pembinaan ditujukan untuk meningkatkan kualitas aparat pengelola barang milik negara, sehingga melalui pembinaan yang intensif dan terarah, implementasi pengamanan aset negara dapat berjalan dengan baik dan mencapai sasaran.

Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Dalam PP No 60 Tahun 2008, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Berdasarkan pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah meliputi metode dan kebijakan yang terkoordinasi di dalam negara untuk mengamankan kekayaan negara, menguji ketepatan, ketelitian dan keandalan catatan/ data akuntansi serta untuk mendorong ditaatinyakebijakan manajemendisenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Dalam PP No 60 Tahun 2008, unsur-unsur Sistem Pengendalian Intern dalam Pemerintah mengacu pada unsur Sistem Pengendalian Intern yang telah dipraktikan di lingkungan pemerintahan di berbagai negara. Penerapan unsur ini dilaksanakan dengan maksud untuk menyatukan dan menjadi bagian

integral dari kegiatan instansi pemerintah, yang meliputi:

1. Lingkungan Pengendalian

Pimpinan Instansi Pemerintah dan seluruh pegawai harus menciptakan dan memelihara lingkungan dalam keseluruhan organisasi yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk mendukung terhadap sistem pengendalian intern dan manajemen yang sehat. Lingkungan pengendalian mencakup:

- a) Penegakan integritas dan nilai etika;
- b) Komitmen terhadap kompetensi;
- c) Kepemimpinan yang kondusif;
- d) Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
- e) Pendelagasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
- f) Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya;
- g) Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif;
- h) Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait.

2. Penilaian Risiko

Pengendalian intern harus memberikan penilaian atas risiko yang dihadapi unit organisasi baik dari luar maupun dari dalam.

Penilaian risiko terdiri atas:

- a) Identifikasi risiko;
- b) Analisis risiko.

3. Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian membantu memastikan bahwa arah pimpinan Instansi Pemerintah dilaksanakan. Kegiatan pengendalian harus efisien dan efektif dalam pencapaian tujuan organisasi serta sesuai dengan ukuran, kompleksitas dan sifat dari tugas dan fungsi suatu instansi pemerintah yang bersangkutan. Kegiatan pengendalian terdiri atas:

- a) Reviu atas kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan;

- b) Pembinaan sumber daya manusia;
- c) Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi;
- d) Pengendalian fisik atas aset;
- e) Penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja;
- f) Pemisahan fungsi;
- g) Otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting;
- h) Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian;
- i) Pembatasan akses dan sumber daya dan pencatatannya;
- j) Akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya; dan
- k) Dokumentasi yang baik atas sistem pengendalian intern serta transaksi dan kejadian penting.

4. Informasi dan Komunikasi

Informasi harus dicatat dan dilaporkan kepada Instansi Pemerintah dan pihak lain yang ditentukan. Informasi disajikan dalam suatu bentuk dan sarana tertentu serta tepat waktu yang diselenggarakan secara efektif sehingga memungkinkan pimpinan Instansi Pemerintah melaksanakan pengendalian dan tanggungjawabnya. Untuk menyelenggarakan sistem informasi yang efektif pimpinan instansi pemerintah harus:

- a. Menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi;
- b. Mengelola, mengembangkan, dan memperbaharui sistem informasi secara terus menerus.

5. Pemantauan Pengendalian Intern

Pemantauan harus dapat menilai kualitas kinerja dari waktu ke waktu dan memastikan bahwa rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya dapat segera ditindak lanjuti. Pemantauan sistem pengendalian intern dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut hasil rekomendasi audit dan reviu lainnya.

Sumber Daya Manusia

Secara umum Sumber daya manusia adalah manusia yang bekerja dilingkungan suatu organisasi, sumber daya manusia adalah potensi manusiawi sebagai penggerak organisasi dalam mewujudkan eksistensinya. Manusia pelaksana dalam pemerintahan harus baik, ini merupakan faktor esensial dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pentingnya faktor ini karena manusia merupakan subjek dalam setiap aktivitas pemerintahan.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2006 pasal 33 ayat 1 menyatakan bahwa pengelola barang, pengguna barang dan/ atau kuasa pengguna barang wajib melakukan pengamanan barang milik negara/ daerah yang berada dalam penguasaannya. Dari peraturan tersebut di atas jelas bahwa peran sumber daya manusia sangat berpengaruh dalam pengananan aset negara. Oleh karena itu perlu adanya sumber daya aparatur yang memiliki pemahaman akan seluruh pengelolaan aset. Dalam mengelola sumber daya manusia tersebut dapat dilakukan dengan mengikut sertakan dalam pendidikan dan pelatihan bimbingan teknis pengelolaan barang. Pembinaan ditujukan untuk meningkatkan kualitas aparat pengelola barang milik negara, sehingga melalui pembinaan yang intensif dan terarah, implementasi pengamanan aset negara dapat berjalan dengan baik dan mencapai sasaran.

Menurut Susilo (2002:3) Sumber dayamanusia adalah pilar penyangga utama sekaligus penggerak roda organisasi dalam usaha mewujudkan visi dan misi tujuannya. Manusia merupakan bagian dari sumber daya yang dibutuhkan organisasi/ perusahaan. Namun pelaksanaanya, kebijakan manajemen masih banyak yang belum memperhatikan peran sumber daya manusia (SDM). Dalam hal ini beberapa hal yang diperhatikan dalam sumber daya manusia, yaitu :

- a. Persaingan dalam sumber daya manusia

Adalah persaingan dalam kualitas sumber daya manusia dari setiap organisasi, baik dalam bentuk perusahaan ataupun lainnya. Kualitas sumber daya manusia ini diukur dari kemampuan pengetahuannya. Pengetahuan disini dimaksud dalam arti luas yaitu kemampuan SDM yang tercermin dari kinerjanya dan terlihat dari prilakunya yang kompeten, cepat dan inovatif serta dorongan yang kuat untuk belajar.

Nilai-nilai dalam sumber daya manusia adalah jumlah dari sumber daya manusia pada sebuah organisasi dan dapat juga disebut sebagai model intelektual dari orang-orang dalam organisasi, kemampuan yang mereka miliki, dan menggungkannya dalam pekerjaan. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam peningkatan sumber daya manusia adalah dengan menggunakan semua bakat yang dimiliki sumber daya manusia yang ada dalam organisasi dan mengambil yang terbaik dari populasi bervariasi diluar organisasi mereka.

b. Manajemen Sumber Daya Manusia

Menurut Stoner (2002:20) “manajemen sumber daya manusia adalah suatu prosedur yang berkelanjutan yang bertujuan untuk memasok suatu organisasi atau perusahaan dengan orang-orang yang tepat untuk ditempatkan pada posisi dan jabatan-jabatan yang tepat pada saat organisasi memerlukannya”. Tujuan dari manajemen sumber daya manusia adalah menetapkan kebijakan organisasi untuk dapat meningkatkan kontribusi atau peranan lain. Adapun proses manajemen sumber daya manusia antara lain :

- a) Perencanaan sumber daya manusia,
- b) Perekrutan sumber daya manusia,
- c) Sosialisasi atau orientasinya,
- d) Pelatihan dan pengembangan,
- e) Penilaian prestasi.

c. Manusia Pelaksana

Berhasil atau tidaknya pelaksanaan aset negara sebagian besar tergantung manusia pelaksanaannya/sumber daya manusia, sumber daya manusia pelaksana pada pemerintahan itu sendiri yang terdiri atas:

1. Kepala Satuan Kerja

Berhasil tidaknya suatu daerah tergantung kepada kepala satuan kerjanya dan kemampuan pribadi yang dimiliki oleh kepala satuan kerja yang bersangkutan dalam menjalankan tugasnya yaitu:

- a. Menjalankan hak, wewenang, dan kewajiban pimpinan satuan kerja;
- b. Mewakili daerahnya di dalam dan diluar pengadilan;
- c. Menggunakan barang milik negara, mengawasi pelaksanaan anggaran, dan menyusun menyampaikan laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinya

2. Kemampuan Aparatur Pemerintah

Aparatur Pemerintah adalah pelaksana dalam pengguna anggaran/ barang bagi satuan kerja.

3. Partisipasi Masyarakat

Keberhasilan penyelenggaraan pengamanan aset barang milik negara juga tidak terlepas dari adanya partisipasi aktif anggota masyarakatnya. Pentingnya partisipasi masyarakat dalam menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dapat terjadi pada empat jenjang yaitu:

- a. Partisipasi dalam proses pembuatan keputusan;
- b. Partisipasi dalam pelaksanaan;
- c. Partisipasi dalam pemanfaatan hasil;
- d. Partisipasi dalam evaluasi.

Penelitian Terdahulu

Mifitri (2009) melakukan penelitian yang menguji tentang Studi Pengaruh Pengelolaan Barang Milik Daerah Terhadap

Pengamanan Aset Daerah. Penelitian ini dilakukan pada Kantor Pemerintah daerah Kabupaten Langkat. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pengaruh pengendalian dan kemampuan aparatur memberikan dampak yang signifikan terhadap Pengamanan Aset Daerah pada Kabupaten Langkat.

Putra (2012) melakukan penelitian tentang Analisis Pengaruh Perencanaan, Pelaksanaan, Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian terhadap Pengelolaan Barang Milik Daerah. Penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Kabupaten Sarolangun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan pengendalian berpengaruh terhadap pengelolaan barang milik daerah.

Hasfi (2013) melakukan penelitian tentang Pengelolaan Barang Milik Negara. Penelitian ini dilakukan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan keuangan dan Aset Kabupaten Sintang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sumber Daya Aparatur memberikan dampak yang signifikan pada pengelolaan Barang Milik Negara dalam hal pengamanan dan pemeliharaan aset.

Putra (2012) melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana Model Efektifitas dan faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengelolaan barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Propinsi Lampung. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa ada pengaruh signifikan kemampuan pengurus dan penyimpan barang terhadap Penatausahaan Barang Daerah.

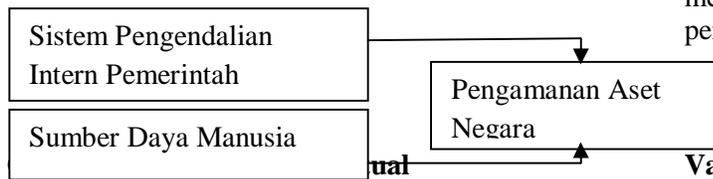
Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dimaksudkan sebagai konsep untuk menjelaskan mengungkapkan keterkaitan antara variabel yang akan diteliti berdasarkan rumusan masalah. Pengelolaan barang milik Negara merupakan fungsi yang sangat strategis dan vital. Dengan langkah inventarisasi dan revaluasi aset/kekayaan negara diharapkan akan mampu memperbaiki/menyempurnakan

administrasi pengelolaan BMN yang ada saat ini. Dengan langkah inventarisasi dan penilaian BMN tersebut, diproyeksikan kedepan akan dapat terwujud database BMN yang akurat dan reliabel, sehingga dapat dipergunakan bagi kepentingan penyusunan rencana kebutuhan dan penganggaran atas belanja barang dan/atau belanja modal pada kementerian/lembaga negara.

Sebagai pondasi bagi seluruh proses pengamanan dalam pengelolaan aset negara, setiap instansi pemerintah harus menciptakan dan memelihara lingkungan dalam organisasi yang mendorong perilaku (*behavior*) positif dan manajemen yang sehat. Utamanya adalah mendorong tersedianya seluruh pengelola aset negara yang memiliki kesadaran (*awareness*) yang kuat tentang pentingnya penegakan sistem pengendalian intern. Penciptaan ini dilakukan melalui penegakan integritas dan nilai-nilai etika oleh seluruh pegawai, komitmen terhadap kompetensi setiap komponen organisasi, adanya kepemimpinan yang kondusif, tersusunnya struktur organisasi yang mendukung strategi pencapaian tujuan, adanya pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat, kebijakan yang sehat dalam pembinaan sumber daya manusia yang efektif dan hubungan kerja yang baik antar instansi.

Dalam pelaksanaannya, pengamanan aset negara merupakan kewenangan dari pemerintah pusat untuk dilaksanakan oleh satuan kerja yang ada di bawahnya. Pengamanan aset negara haruslah didasarkan kepada faktor-faktor yang dapat menjamin suatu satuan kerja yang bersangkutan mampu mengelola aset yang dimilikinya masing-masing. Diantara faktor-faktor tersebut yang mendukung terselenggaranya pengamanan aset negara diantaranya adalah sistem pengendalian intern dan kemampuan sumber daya manusia yang ada, serta ketersediaan sumber daya alam dan peluang ekonomi daerah tersebut.



menyebarkan kuesioner kepada populasi dalam penelitian ini.

Variabel Penelitian

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas dua variabel yaitu :

2. Variabel endogen dalam penelitian ini adalah engamanan aset negara.
3. Variabel Eksogen dalalam penelitian ini adalah:
 - a. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah(X₁)
 - b. Sumber Daya Manusia (X₂)

Hipotesis

Berdasarkan kerangka konseptual, dapat dilakukan hipotesis sebagai berikut:

- H₁ : Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Barang Milik Negara berpengaruh signifikan positif terhadap Pengamanan aset negara.
- H₂ : Sumber Daya Manusia berpengaruh signifikan positif terhadap Pengamanan Aset Negara

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka jenis penelitian ini tergolong pada penelitian kausatif.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini menggunakan instansi yaitu satuan kerja Di lingkungan Kementerian Perindustrian Wilayah Jawa Sumatera. Jumlah Satuan Kerja adalah 35 Satuan Kerja yang terdiri dari Sekolah, Balai Pelatihan, Balai Riset, dan Balai Besar.Pengambilan sampel menggunakan teknik *total sampling*, dimana seluruh satuan kerja yang terdapat di wilayah Jawa Sumatera dijadikan sampel.Responden dalam penelitian ini adalah Staf pengelola Barang Milik NegaraSatuan Kerja di Kementerian Perindustrian Wilayah Jawa Sumatera memiliki 2 (dua) orang staf penanggungjawab. Berdasarkan kategori Satuan Kerja yang ada, maka jumlah sample penelitian menjadi responden. Dengan rincian tersebut maka didapat jumlah sampel penelitian sebanyak 70 orang.

Jenis, Sumber dn Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data subjek.sumber data dalam penelitian ini adalah data primer. data untuk penelitian ini dikumpulkan dengan cara

Pengukuran Variabel

1. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur valid atau tidaknya suatu kuesioner.Suatu kuesioner dikatakan valid jika pernyataan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang diukur oleh kuesioner tersebut, (Ghozali, 2007:45).Sebelum kuesioner dibagikan maka dilakukan uji pendahuluan. Uji pendahuluan atau *pilot test* dilakukan kepada mahasiswa Fakultas Universitas Negeri Padang, khususnya kepada mahasiswa Program Studi Akuntansi dan telah menyelesaikan perkuliahan Akuntansi Sektor Publik dan Lanjutan, Keuangan dan Daerah dan Seminar Akuntansi Sektor Publik.

Uji validitas digunakan rumus *Product Moment* sebagai berikut:

$$r_{xy} = \frac{N(\sum XY) - (\sum Y)(\sum X)}{\sqrt{\{N\sum X^2 - (\sum X)^2\}\{N\sum Y^2 - (\sum Y)^2\}}}$$

(Arikunto, 2006:170)

Keterangan:

- r xy = Koefisien Korelasi
- N = Besar sampel
- x = Variabel Bebas (X₁, X₂)
- y = Variabel Terikat

Jika nilai r hitung < r tabel maka nomor item tersebut tidak valid dan jika nilai r hitung > r tabel maka item tersebut dinyatakan valid dan dapat digunakan untuk analisis selanjutnya.

2. Uji Reliabilitas

Kuesioner dinyatakan *reliable* jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konstan/stabil dari waktu ke waktu (Ghozali, 2007: 41). Untuk uji reliabilitas dapat digunakan rumus *croanbach's alpha*:

$$r = \left[\frac{k}{(k-1)} \right] \left[\frac{\sum \sigma b^2}{\sigma^2 t} \right]$$

(Arikunto, 2006:196)

Dimana:

- r = Reliabilitas Instrumen
- k = Banyak butir pertanyaan
- $\sum \sigma_b^2$ = Jumlah varians butir
- $\sigma^2 t$ = Varian total

Cara untuk mengukur reliabilitas dengan *Cronbach's Alpha* menurut Sekaran (2003:205) dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Kurang dari 0,6 tidak reliabel
- b. 0,6 – 0,7 akseptabel
- c. 0,7 – 0,8 baik
- d. Lebih dari 0,8 reliabel

Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah distribusi sebuah data mengikuti atau mendekati distribusi normal. Untuk mengetahui apakah data terdistribusi normal maka dalam penelitian ini digunakan uji *statistic kolmogorov smirnov*, data yang normal adalah data yang memiliki nilai signifikansi $> 0,05$.

2. Uji Heteroskedastisitas

Model regresi mengasumsikan tidak terjadinya *heteroskedastisitas*. Untuk mendeteksi terjadinya gejala heteroskedastisitas maka dilakukan uji *glejser*. Data yang tidak heteroskedastisitas adalah data yang nilai signifikansinya diatas tingkat kepercayaan 0,05 (>5%).

3. Uji Multikolinearitas

Uji *multikolinearitas* bertujuan untuk mendeteksi apakah tidak terdapat korelasi yang tinggi antara variabel independent yang satu dengan variabel independent yang lain. Korelasi antar variabel independent ini dapat dideteksi dengan

menggunakan *variabel inflation factor (VIF)*. Multikolinearitas terjadi jika nilai tolerance $> 0,10$ dan nilai VIF < 10 .

Teknik Analisis Data

Data-data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis sesuai dengan langkahlangkah berikut:

1. Analisis Deskriptif

a. Verifikasi Data

Verifikasi data adalah memeriksa kembali kuesioner yang telah diisi oleh responden untuk memastikan semua pernyataan telah diisi oleh responden.

b. Menghitung Nilai Jawaban

$$\frac{5SB + 4B + 3RR + 2TB + 1STB}{15}$$

Dimana:

- SB = Sangat Baik
- B = Baik
- RR = Ragu-Ragu
- TB = Tidak Baik
- STB = Sangat Tidak Baik

c. Menghitung Relevan Responden

$$\text{Mean} = \frac{\sum_{h=1}^n x_i}{n}$$

Dimana:

- x_i = skor Total
- n = Jumlah Responden

d. Menghitung nilai TCR masing-masing kategori jawaban dari deskriptif Dengan

rumus:

$$\text{TCR} = \frac{R_s}{n} \times 100$$

Dimana:

- TCR = Tingkat Capaian Responden
- R_s = Rata-rata skor jawaban responden
- n = Nilai skor jawaban

Nilai persentase dimasukkan ke dalam kriteria sebagai berikut:

- a. Interval jawaban responden 76-100% kategori jawabannya baik.
- b. Interval jawaban responden 56-75% kategori jawabannya cukup baik.

c. Interval jawaban responden <56% kategori jawabannya kurang baik.

Analisi Data

a. Analisis Regresi Berganda

Alat analisis regresi berganda digunakan untuk melihat pengaruh beberapa variabel independen terhadap variabel dependen. Persamaan regresi untuk menguji hipotesis tersebut adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Dimana:

- Y = Pelaksanaan Otonomi Daerah Pada Pemerintah Kota Padang
- a = Konstanta
- b_{1,2} = Koefisien regresi dari variabel independen
- X₁ = Penerapan GG
- X₂ = Kemampuan SDM
- e = *error term*

b. Uji F (*F-Test*)

Uji F dilakukan bertujuan untuk menguji apakah hasil analisis regresi berganda modelnya sudah *fix* atau belum dan untuk dapat mengetahui pengaruh antara variabel bebas dan variabel terikat secara keseluruhan atau secara simultan. Patokan yang digunakan dalam pengujian ini adalah membandingkan nilai *sig* yang diperoleh dengan derajat signifikansi pada level $\alpha = 0,05$. Apabila nilai *sig* yang diperoleh lebih kecil dari derajat signifikansi maka model yang digunakan sudah *fix*. Rumus yang digunakan adalah:

$$F = \frac{R^2 / (k - 1)}{(1 - R^2) / (n - k)}$$

(Gujarati, 1999:120)

Keterangan:

- F = Uji F
- R² = Koefisien determinan
- k = Jumlah variabel bebas
- n = Jumlah Sampel

c. Uji Hipotesis (*t-Test*)

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan yang signifikan dari masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Untuk melihat nilai signifikan masing-masing

parameter yang diestimasi, maka digunakan *t-Test* dengan rumus :

$$t - Test = \frac{\beta_n}{S\beta_n}$$

keterangan

- t = Nilai mutlak untuk pengujian
- β_n = Koefisien regresi masing-masing variabel
- S β_n = Standar *error* masing-masing variabel

Dengan kriteria pengujian :

- a) Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka Ha diterima.
- b) Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka Ha ditolak.

Selain kriteria tersebut, untuk melihat ada tidaknya pengaruh semua variabel bebas terhadap variabel terikat dapat ditentukan dengan melihat tingkat signifikansi dengan nilai $\alpha = 0,05$. Apabila tingkat signifikansi < 0,05 berarti Ha diterima dan H₀ ditolak. Sebaliknya, apabila tingkat signifikansi > 0,05 berarti Ha ditolak dan H₀ diterima.

d. Uji Determinasi

Untuk mengetahui kontribusi dari variabel bebas terhadap variabel terikat dilihat dari *adjusted R square*-nya, pemilihan nilai *adjusted R square* karena penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda dengan jumlah variabel lebih dari satu. Koefisien determinasi (R²) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel terikat. *Adjusted R²* berarti R² sudah disesuaikan dengan derajat bebas dari masing-masing jumlah kuadrat yang tercakup di dalam perhitungan *Adjusted R²*. Untuk membandingkan dua R², maka harus memperhitungkan banyaknya variabel X yang ada dalam model. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan *adjusted R²* yaitu:

$$Adjusted R^2 = 1 - \left(1 - R^2\right) \left[\frac{N - 1}{N - k}\right]$$

Dari rumus di atas jelas bahwa:

- 1 Kalau $k > 1$ maka $adjusted R^2 < R^2$, yang berarti bahwa apabila banyaknya variabel bebas ditambah, $adjusted R^2$ dan R^2 akan sama-sama meningkat, tetapi peningkatan $adjusted R^2$ lebih kecil daripada R^2 .
- 2 $Adjusted R^2$ dapat positif atau negatif, walaupun R^2 selalu non negatif. Jika $adjusted R^2$ negatif nilainya dianggap 0.

Definisi Operasional

1. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah meliputi metode dan kebijakan yang terkoordinasi di dalam pemerintah untuk mengamankan kekayaan negara, menguji ketepatan, ketelitian dan keandalan catatan/data akuntansi serta untuk mendorong ditaatinya kebijakan manajemen. Sistem Pengendalian Intern diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
2. Sumber Daya Manusia merupakan potensi yang terkandung dalam diri manusia untuk mewujudkan perannya dalam melaksanakan tugas yang mampu mengelola dirinya sendiri serta potensi diri yang dimilikinya untuk mencapai kesejahteraan tujuan bersama agar tercapainya tujuan yang diinginkan.
3. Pelaksanaan pengamanan aset negara merupakan proses menjaga/memelihara dan memanfaatkan modal publik, hal ini dilakukan dalam rangka melaksanakan tertib administrasi pengelolaan barang milik negara sehingga terciptanya manajemen pemerintahan yang dapat bekerja secara efisien, efektif dan ekonomis yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.. Sebagai pondasi bagi seluruh proses pengelolaan aset negara yang baik, setiap instansi pemerintah harus menciptakan dan memelihara lingkungan dalam organisasi yang tersedianya seluruh pengelola aset negara yang memiliki kesadaran yang kuat tentang pentingnya penegakan sistem pengendalian intern.

Serta dilakukan melalui penegakan integritas dan nilai-nilai etika oleh seluruh pegawai, komitmen terhadap kompetensi setiap komponen organisasi, adanya kepemimpinan yang kondusif, tersusunnya struktur organisasi yang mendukung strategi pencapaian tujuan, adanya pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat, kebijakan yang sehat dalam pembinaan sumber daya manusia yang efektif dan hubungan kerja yang baik antar instansi..

TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Uji Reabilitas

Untuk uji reliabilitas instrumen, semakin dekat koefisien keandalan dengan 1,0 maka akan semakin baik. Secara umum, keandalan kurang dari 0,60 dianggap buruk, keandalan dalam kisaran 0,7 bisa diterima, dan lebih dari 0,80 adalah baik (Sekaran, 2006:182).

Dari Tabel dapat dilihat Keandalan konsistensi antar item atau koefisien keandalan Cronbach's Alpha yang terdapat pada Tabel 13 di atas yaitu untuk penerapan SPIP 0,760, untuk instrumen kemampuan SDM 0,800, untuk instrumen pengamanan aset Negara 0,802. Data ini menunjukkan nilai yang berada pada kisaran di atas 0,7. Dengan demikian semua instrumen penelitian dapat dikatakan reliabel.

2. Uji Validitas

Untuk melihat validitas dari masing-masing item kuesioner, digunakan Corrected Item-Total Correlation. Jika $r_{hitung} > r_{tabel}$, maka data dikatakan valid, dimana r_{tabel} untuk $N = 60$, adalah 0,2144. Berdasarkan hasil pengolahan data didapatkan bahwa nilai *Corrected Item-Total Correlation* untuk masing-masing item variabel X_1 , X_2 , dan Y semuanya di atas r_{tabel} . Jika dapat dikatakan bahwa seluruh item pernyataan variabel X_1 , X_2 , dan Y adalah valid.

Dari Tabel nilai terkecil dari *Corrected Item-Total Correlation* untuk masing-masing instrumen. Untuk instrumen penerapan SPIP (X_1) diketahui nilai *Corrected Item-Total*

Correlation terkecil 0,292. Kemampuan SDM (X₂) nilai terkecil 0,274, pengamanan aset negara nilai terkecil 0.274.

Hasil Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Pada uji normalitas menyatakan nilai *Kolmogorov-Smirnov* sebesar 0,475 dengan signifikan 0,982. Berdasarkan hasil tersebut dapat dinyatakan data yang digunakan dalam penelitian ini telah terdistribusi. Pengujian normalitas dapat dilakukan dengan menggunakan *One Sample Kolmogorov-Smirnov Test*, dengan taraf signifikan 0,05 atau 5%. Jika signifikan yang dihasilkan > 0,05 maka distribusi datanya dikatakan normal. Sebaliknya jika signifikan yang dihasilkan < 0,05 maka data tidak terdistribusi secara normal. i normal dan bisa dilanjutkan untuk diteliti lebih lanjut, karena nilai signifikan dari uji normalitas > 0,05.

Hasil uji normalitas menyatakan nilai *Kolmogorov-Smirnov* sebesar 0.625 dengan signifikan 0,829. Berdasarkan hasil tersebut dapat dinyatakan data yang digunakan dalam penelitian ini telah berdistribusi normal dan bisa dilanjutkan untuk diteliti lebih lanjut, karena nilai signifikan dari uji normalitas > 0,05.

2. Uji Multikolinearita

Hasil nilai VIF yang diperoleh dalam Tabel di atas menunjukkan variable bebas dalam model regresi tidak saling berkorelasi. Diperoleh nilai VIF untuk masing-masing variabel bebas kurang dari 10 dan *tolerance value* berada diatas 0,10. Hal ini menunjukkan tidak adanya korelasi antara sesama variable bebas dalam model regresi dan disimpulkan tidak terdapat masalah multikolinearitas diantara sesama variabel bebas dalam model regresi yang dibentuk.

3. Uji Heterokedastisitas

Dari tabel dapat dilihat tidak ada variabel yang signifikan dalam regresi dengan variabel Abres. Tingkat signifikansi > α 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi yang

digunakan dalam penelitian ini terbebas dari heteroskedastisitas.

Hasil Analisis Berganda

Untuk mengungkap pengaruh variabel yang dihipotesiskan dalam penelitian ini dilakukan melalui analisis regresi berganda. Model regresi berganda yang digunakan terdiri dari 2 variabel bebas yaitu SPIP(X₁), sumber daya manusia (X₂) dan satu variabel terikat yaitu pengamanan aset negara (Y).

Uji Model

Uji F (F-Test)

Dari hasil pemrosesan data, dapat dilihat bahwa F_{hitung} yaitu 5,111 dengan nilai signifikansi yaitu 0,021 < 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independent (penerapan SPIP dan kemampuan SDM) secara bersama-sama signifikan (F = 2,252 > 0,320) (Gaska, 2015) terhadap variabel dependen (pengamanan aset negara).

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Dari tampilan *output SPSS model summary* pada Tabel 17 di atas besarnya *Adjusted R Square* adalah 0,2474. Hal ini mengindikasikan bahwa kontribusi variabel penerapan SPIP, dan kemampuan SDM adalah sebesar 24,7%, sedangkan 75,3% lainnya ditentukan oleh faktor lain diluar model yang tidak terdeteksi dalam penelitian ini.

Uji Hipotesis (t-test)

Pengujian hipotesis secara parsial dilakukan dengan cara membandingkan nilai t_{hitung} dengan nilai t_{tabel} . Nilai t_{tabel} dengan $\alpha = 0,05$ dan derajat bebas (db) = $n - k - 1 = 60 - 2 - 1 = 57$ adalah 2,00247. Berdasarkan hasil analisis pada Tabel 19, maka dapat diketahui pengaruh antara variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen pada uraian berikut ini :

a. SPIP(X₁) berpengaruh signifikan positif terhadap pengamanan aset negara.

Pengujian hipotesis 1 dilakukan dengan membandingkan nilai t_{hitung} dan t_{tabel} . Hipotesis diterima jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ dan nilai sig < α 0,05. Nilai t_{tabel} pada $\alpha = 0,05$ adalah 2,00247. Untuk variabel penerapan SPIP (X₁) nilai t_{hitung} adalah 2,012 dan nilai sig adalah 0,049. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$,

yaitu $2,012 > 2,00247$ dan nilai signifikansi $0,049 < \alpha 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan SPIP (X_1) berpengaruh signifikan dan positif terhadap pengamanan aset negara. Sehingga hipotesis pertama dalam penelitian ini **diterima**.

- b. Kemampuan Sumber Daya Manusia (X_2) berpengaruh signifikan positif terhadap pengamanan aset negara,

Pengujian hipotesis 2 dilakukan dengan membandingkan nilai t_{hitung} dan t_{tabel} . Hipotesis diterima jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ dan nilai $sig < \alpha 0,05$. Nilai t_{tabel} pada $\alpha = 0,05$ adalah 2,00247. Untuk variabel kemampuan SDM (X_2) nilai t_{hitung} adalah 2,216 dan nilai sig adalah 0,005. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$, yaitu $2,216 > 2,00147$ dan nilai signifikansi $0,005 < \alpha 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan SDM (X_2) berpengaruh signifikan dan positif terhadap pengamanan aset negara. Sehingga hipotesis kedua dalam penelitian ini **diterima**.

Pembasan

1. Pengaruh Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Pengamanan Aset Negara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan dan positif antara penerapan sistem pengendalian intern pemerintah dengan pengamanan aset negara. Hal ini berarti semakin baik penerapan sistem pengendalian intern pemerintah, maka sistem pengamanan aset negara pun akan semakin optimal. Dimana pada tabel distribusi frekuensi variabel penerapan sistem pengendalian intern pemerintah indikator partisipasi mendapat capaian responden tertinggi dengan kategori baik yang menunjukkan bahwa kebijakan yang telah disosialisasikan dan dipergunakan sebagai pedoman bagi pelaksanaan kegiatan merupakan faktor terbesar dari pengendalian intern.

Hasil yang sama juga ditunjukkan oleh penelitian yang sebelumnya yang dilakukan oleh Mifitri (2009) melakukan penelitian yang menguji tentang Studi Pengaruh Pengelolaan Barang Milik Daerah Terhadap Pengamanan Aset Daerah. Dimana pengendalian dan kemampuan aparatur memberikan dampak yang signifikan terhadap

pengamanan aset. Hasil serupa juga ditunjukkan oleh penelitian Putra (2012) yang melakukan penelitian tentang Analisis Pengaruh Perencanaan, Pelaksanaan, Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian terhadap Pengelolaan Barang Milik Daerah dimana pengendalian berpengaruh terhadap pengelolaan barang milik daerah.

Sistem pengendalian internal meliputi organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipenuhinya kebijakan manajemen (Mulyadi, 2001:183). Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 Sistem pengendalian intern merupakan proses integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pengelolaan barang milik negara merupakan fungsi yang sangat strategis dan vital. Dengan langkah inventarisasi dan revaluasi aset/kekayaan negara diharapkan akan mampu memperbaiki/menyempurnakan administrasi pengelolaan barang milik negara yang ada saat ini. Dengan langkah inventarisasi dan penilaian barang milik negara tersebut, diproyeksikan kedepan akan dapat terwujud database barang milik negara yang akurat dan reliable, sehingga dapat dipergunakan bagi kepentingan penyusunan rencana kebutuhan dan penganggaran atas belanja barang dan/atau belanja modal pada kementerian/lembaga negara.

Pentingnya langkah pengamanan barang milik negara, maka harus didukung oleh faktor sistem pengendalian yang baik dari suatu instansi, agar keamanan dapat terjaga dengan baik. Bila dilihat dari hasil jawaban responden, penerapan yang dilaksanakan sudah baik. Terlihat dari total jawaban responden yang hampir seluruh item termasuk dalam kategori baik. Beberapa hal yang belum dilakukan secara optimal adalah menetapkan kebijakan & prosedur pengamanan aset serta menunjuk penanggungjawab pemakai aset, dan menyelenggarakan penatausahaan barang, membuat kode inventaris barang. Bila hal

ini telah dilakukan secara maksimal, maka pengamanan aset negara akan dapat terlaksana dengan lebih baik lagi.

Pada umumnya masing-masing satuan kerja Kementerian Perindustrian telah menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah secara baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, tetapi masih ada beberapa satuan kerja yang belum maksimal dalam pemanfaatan barang-barang milik negara yang berakibat pada temuan pemeriksaan BPK sebagai akibat kurangnya pengendalian. Hal tersebut karena perilaku aparatur pengelola barang-barang milik negara masih belum memiliki norma dan etika sebagai pengelola barang milik negaramenunjukkan bahwa sangat lemahnya sistem pengendalian intern yang berakibat pada semakin tinggi risiko yang dihadapi dalam pengamanan aset. Oleh karena itu perlu adanya peningkatan pengendalian intern untuk proses pengadaan, dan juga perlu dikembangkan pada proses perencanaan dan penganggaran, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian aset negara.

2. Pengaruh Sumber Daya Manusia terhadap Pengamanan Aset Negara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dan positif sumber daya manusia terhadap pengamanan aset negara. Hal ini berarti bahwa semakin baik sumber daya manusia, maka pengamanan aset negara pun akan terlaksana dengan lebih baik lagi. Dimana pada tabel distribusi frekuensi variabel sumber daya manusia indikator partisipasi mendapat capaian responden tertinggi dengan kategori baik yang menunjukkan bahwa setiap bagian akuntansi dan pengelola barang milik negara menyusun laporan sesuai dengan tanggung jawabnya dengan benar.

Hasil yang sama juga ditunjukkan oleh penelitian yang sebelumnya yang dilakukan Hasfi (2013) melakukan penelitian tentang pengelolaan barang milik negara. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa sumber daya aparatur memberikan dampak yang signifikan pada pengelolaan barang milik negara dalam hal pengamanan dan pemeliharaan aset.

Menurut Susilo (2002:3) sumber daya manusia adalah pilar penyangga utama sekaligus penggerak roda organisasi dalam usaha mewujudkan visi dan misi tujuannya. Manusia merupakan bagian dari sumber daya yang dibutuhkan organisasi/ perusahaan. Namun pelaksanaannya, kebijakan manajemen masih banyak yang belum memperhatikan peran sumber daya manusia.

Sebagai pondasi bagi seluruh proses pengamanan dalam pengelolaan aset negara, setiap instansi pemerintah harus menciptakan dan memelihara lingkungan dalam organisasi yang mendorong perilaku (*behavior*) positif dan manajemen yang sehat. Utamanya adalah mendorong tersedianya seluruh pengelola aset negara yang memiliki kesadaran (*awareness*) yang kuat tentang pentingnya penegakan sistem pengendalian intern. Penciptaan ini dilakukan melalui penegakan integritas dan nilai-nilai etika oleh seluruh pegawai, komitmen terhadap kompetensi setiap komponen organisasi, adanya kepemimpinan yang kondusif, tersusunnya struktur organisasi yang mendukung strategi pencapaian tujuan, adanya pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat, kebijakan yang sehat dalam pembinaan sumber daya manusia yang efektif dan hubungan kerja yang baik antar instansi.

Sistem yang baik tidak akan ada artinya, jika tidak dapat berjalan dan tidak dilaksanakan oleh orang-orang yang memiliki dedikasi tinggi terhadap tugasnya. Pengelola barang, pengguna barang dan/ atau kuasa pengguna barang wajib melakukan pengamanan barang milik negara yang berada dalam penguasaannya., karena manusia pelaksana merupakan faktor esensial dalam penyelenggaraan pemerintah dan manusia merupakan subjek dalam aktivitas pemerintah. Dari semua pernyataan menyatakan bahwa peran dan kemampuan sumber daya manusia yang baik sangat berpengaruh terhadap pengamanan aset negara. Oleh karena itu perlu adanya sumber daya aparatur yang memiliki pemahaman akan seluruh pengelolaan aset.

Dilihat dari data frekuensi untuk variabel sumber daya manusia, dimana tingkat pencapaian responden rata-rata baik, namun jika dilihat di lapangan belum dapat dikategorikan baik.

Kemampuan sumber daya manusia pada satuan kerja Kementerian Perindustrian saat ini belum terlalu baik, terlihat dari hasil jawaban responden. Pengelola barang milik negara belum sepenuhnya dapat menjalankan tugas sesuai dengan bidangnya, uraian tugas para pengelola barang milik negara belum sepenuhnya sesuai dengan kemampuan masing-masing dan tanggungjawab bagian akuntansi dan pengelola barang ditetapkan secara jelas dalam peraturan, namun belum berjalan secara optimal.

Hal di atas menunjukkan bahwa masih adanya ketidaksesuaian tugas dengan kemampuan sumber daya manusia. Ketidaksesuaian ini menyebabkan pengamanan aset negara belum berjalan secara optimal. Dalam peningkatan mengelola sumber daya manusia tersebut dapat dilakukan dengan mengikut sertakan dalam pendidikan dan pelatihan bimbingan teknis pengelolaan barang. Pembinaan ditujukan untuk meningkatkan kualitas aparat pengelola barang milik negara, sehingga melalui pembinaan yang intensif dan terarah, implementasi pengamanan aset negara dapat berjalan dengan baik dan mencapai sasaran.

PENUTUP

Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk melihat Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Kemampuan Sumber Daya Manusia terhadap Pengamanan Aset Negara. Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Terdapat pengaruh yang signifikan dan positif penerapan SPIP terhadap pengaman aset Negara. Dimana semakin baik penerapan SPIP, maka pengamanan aset negara pun akan semakin baik (H_1) diterima.
2. Terdapat pengaruh yang signifikan dan positif kemampuan sumber daya manusia dengan pengamanan aset negara. Dimana semakin baik kemampuan sumber daya manusia, maka pengamanan aset negara pun akan semakin baik (H_2) diterima..

Keterbatasan

Meskipun peneliti telah merancang dan mengembangkan penelitian sedemikian rupa,

namun terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian ini yaitu:

1. Selama penyebaran kuesioner, terdapat beberapa satuan kerja Kementerian Perindustrian wilayah Sumatera dan Jawa yang tidak bersedia mengisi kuesioner serta terdapat sejumlah responden yang dituju yang tidak mengisi kuesioner yang diberikan, selain itu beberapa responden tidak terlalu serius saat membaca kuesioner, sehingga pilihan jawaban yang diberikan pun tidak sesuai dengan kenyataan yang ada.
2. Penelitian ini merupakan metode survey mengutamakan kuesioner tanpa dilengkapi dengan wawancara atau pertanyaan lisan. sebaiknya dalam mengumpulkan data dilengkapi dengan menggunakan pertanyaan lisan dan tertulis.

Saran

Berdasarkan pada pembahasan dan kesimpulan diatas, maka penelitian menyatakan bahwa :

1. Selama penyebaran kuesioner, terdapat beberapa satuan kerja Kementerian Perindustrian wilayah Sumatera dan Jawa yang tidak bersedia mengisi kuesioner serta terdapat sejumlah responden yang dituju yang tidak mengisi kuesioner yang diberikan, selain itu beberapa responden tidak terlalu serius saat membaca kuesioner, sehingga pilihan jawaban yang diberikan pun tidak sesuai dengan kenyataan yang ada.
2. Penelitian ini merupakan metode survey mengutamakan kuesioner tanpa dilengkapi dengan wawancara atau pertanyaan lisan. sebaiknya dalam mengumpulkan data dilengkapi dengan menggunakan pertanyaan lisan dan tertulis.

DAFTAR PUSTAKA

- Aren, Alvin A, Randal J, Beasley, dan Mark S. 2008. *Auditing dan Jasa Assurance*. Edisi Keduabelas. Jakarta: PT Indeks IKAPI.
- Arikunto, Suharsimi. 2000. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- _____. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Baridwan Zaki, 1993. *Sistem Informasi Akuntansi*, Edisi Kedua, Badan Penerbit FE-UGM; Yogyakarta.
- Bastian, Indra, 2006. *Sistem Akuntansi Sektor Publik*, edisi 2, Jakarta: Salemba Empat.
- Cangemi, Michael P., dan Singleton, Tommie. (2002). *Managing The Audit Function A Corporate Audit Departement Procedures Guide*. Third Edition. John Wiley and Sons, Inc.
- Darman, Siska. 2009. *Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah (Studi: BPKP Provinsi Sumatera Barat)*. Skripsi. Padang, FE UNP.
- Eka Putra, Meydiandra, 2012. *Model Efektifitas dan faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengelolaan barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Propinsi Lampung*. Skripsi. Lampung. Unila.
- Ghozali, Imam. 2007. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hasfi, Nyemas. 2013. *Pengelolaan barang Milik Daerah Studi pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan keuangan dan Aset Kabupaten Sintang*. Tesis. Pontianak. Untan.
- Hall, J. A. 2007. *Sistem Informasi Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hermiyetti, 2010. *Pengaruh Penerapan Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud Pengadaan Barang*. Jurnal, Jakarta: STEKPI.
- Kuncoro, Mudrajat. 2003. *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.
- Mardalis, 2006. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Cetakan Kedelapan, Bumi Aksara, Jakarta.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Mifitri, Dewi, 2009. “ *Pengaruh Pengelolaan Barang Milik Daerah Terhadap Pengamanan Aset Daerah Pada Kabupaten Langkat*”, Skripsi, Medan: USU.
- Miftah, Thoha, 2001. *Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasinya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Mulyadi. 2000. *Akuntansi Biaya Edisi 5*. Yogyakarta: Aditya Media.
- _____. 2001. *Sistem Akuntansi*, Yogyakarta : STIE YKPN.

- Niswonger, Warren, Reeve and Fess yang diterjemahkan oleh Alfonsus Sirait, M. Bus. (1999). *Prinsip-Prinsip Akuntansi*. Edisi ke-19, Jakarta: Erlangga.
- Pardiman, Muh, Alin Nuha, 2008. “*Penataan Pengelolaan Barang Milik Negara*”, Departemen Keuangan Republik Indonesia, Januari.
- Putra, Ardiansyah 2012. “*Analisis Pengaruh Perencanaan, Pelaksanaan, Pembinaan, Pengawasan Dan Pengendalian Terhadap Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Sarolangun*”, Tesis, Medan: USU.
- Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah*.
- _____, *Peraturan Pemerintah No.2 tahun 2001 tentang Pengamanan dan Pengalihan Barang Milik/ Kekayaan Negara Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah*.
- _____, *Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*.
- _____, *Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah*.
- _____, *Peraturan Menteri Keuangan No. 120/PMK.06/2007 Tentang Penatausahaan Barang Milik Negara*.
- _____, *Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara*.
- _____, *Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara*.
- Sugiyono.2008. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Sumini, Oktavia. E. 2010. *Modul Penggunaan, Pengamanan, dan Pemeliharaan BMD*, Jakarta: Pusdiklat Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan.
- Susilo, W, 2002. *Audit Sumber Daya Manusia*, Jakarta, Penerbit Vorqistatama binamega.
- Stoner, A. F. 2002. *Fundamental Of Financial Managing, Corvalis OR: Authors Academic Publishing, USA*, Cetakan Pertama, Alih Bahasa oleh Wandi S. Brata, Jakarta: Gramedia Pustaka Umum.
- Umar, Husein, 2003. *Metodologi Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Wursanto, 2005. *Dasar-Dasar ilmu Organisasi*. Yogyakarta: Penerbit Andi.